

**MODERNISASI ADMINISTRASI PENDIDIKAN: ANALISIS
KUALITAS LAYANAN DATA BERBASIS EMIS DI KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA**

Fauziah Noor Ilmi An-Nabhani¹, Hinggil Permana², Abdul Kosim³

^{1,2,3}Universitas Singaperbangsa Karawang

¹2210631120076@students.unsika.ac.id,

²hinggil.permana@fai.unsika.ac.id, ³abdul.kosim@fai.unsika.ac.id

ABSTRACT

The modernization of data governance through the Education Management Information System (EMIS) has become a key strategy for improving public service quality within the Ministry of Religious Affairs. However, its implementation often faces technical and system integration challenges. This study aims to analyze the quality of EMIS-based data services, coordination workflows, and the obstacles encountered by Islamic Education Teachers (GPAI). A descriptive qualitative method with a case study approach was employed at the Office of the Ministry of Religious Affairs of Karawang Regency. Data were collected through document analysis and in-depth interviews with Islamic Education teachers, EMIS operators, and the Head of the Islamic Education Section. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings reveal that EMIS has contributed significantly to the transformation of administrative processes from manual to integrated digital services. The system has improved transparency, data accessibility, and the validity of teacher certification and personnel records. Effective coordination among stakeholders has also supported the implementation of EMIS-based services. Nevertheless, several challenges remain, including central server congestion during peak usage periods, extended system maintenance, unstable internet connectivity, and data synchronization issues with the Basic Education Data System (Dapodik). These obstacles occasionally affect the efficiency and reliability of data management services. In conclusion, EMIS has enhanced bureaucratic efficiency and strengthened educational data governance. However, continuous technical improvements and stronger system integration are required to ensure consistent, reliable, and high-quality data services for all users.

Keywords: Administrative Modernization, Data Service Quality, EMIS, Islamic Education Teacher, Case Study.

ABSTRAK

Modernisasi tata kelola data melalui Education Management Information System (EMIS) menjadi salah satu strategi utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kementerian Agama. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala teknis dan integrasi sistem. Penelitian ini bertujuan

untuk menganalisis kualitas layanan data berbasis EMIS, alur koordinasi pelaksanaannya, serta hambatan yang dihadapi oleh Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI). Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karawang. Data dikumpulkan melalui analisis dokumen dan wawancara mendalam dengan guru Pendidikan Agama Islam, operator EMIS, serta Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam. Data dianalisis melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa EMIS telah berperan penting dalam mentransformasikan proses administrasi dari sistem manual menjadi layanan digital yang terintegrasi. Penerapan EMIS meningkatkan transparansi, kemudahan akses data, serta validitas data sertifikasi dan kepegawaian guru. Koordinasi antar pihak yang terlibat juga mendukung pelaksanaan layanan berbasis EMIS secara lebih efektif. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa kendala, seperti kepadatan server pusat pada waktu-waktu tertentu, proses pemeliharaan sistem yang cukup lama, koneksi internet yang tidak stabil, serta permasalahan sinkronisasi data dengan sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Kendala tersebut berdampak pada efektivitas dan keandalan layanan pengelolaan data. Dengan demikian, EMIS telah meningkatkan efisiensi birokrasi dan memperkuat tata kelola data pendidikan, meskipun diperlukan penyempurnaan teknis dan penguatan integrasi sistem untuk menjamin kualitas layanan data yang lebih optimal.

Kata Kunci: Modernisasi Administrasi, Kualitas Layanan Data, EMIS, Guru PAI, Studi Kasus.

A. Pendahuluan

Modernisasi administrasi dalam ranah tata kelola tata usaha pendidikan merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari pada era transformasi digital abad ke-21. Reformasi birokrasi yang digulirkan oleh pemerintah menuntut setiap instansi publik untuk menanggalkan sistem pengelolaan data konvensional berbasis kertas (*paper based administration*) yang cenderung tidak efisien, rentan terhadap kerusakan,

serta lambat dalam penyajiannya (Alamsyah, et.al., 2025).

Sebagai wujud nyata dari adaptasi teknologi tersebut, Kementerian Agama Republik Indonesia secara masif mengintegrasikan *Education Management Information System* (EMIS) sebagai pangkalan data tunggal elektronik (Huda & Hidayati, 2026). Sistem ini dirancang bukan sekadar untuk mengikuti arus digitalisasi global, melainkan sebagai instrumen strategis guna

meremajakan tata kelola data pendidikan Islam, menjamin validitas dokumen, serta memotong jalur birokrasi yang berbelit-belit demi mewujudkan kualitas pelayanan publik yang optimal, transparan, dan akuntabel di semua lini struktural.

Di tengah bergulirnya arus modernisasi ini, pengelolaan data Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) pada sekolah umum memiliki kompleksitas tersendiri yang sangat unik sekaligus menantang. Secara kelembagaan dan operasional pembelajaran di dalam kelas, para guru agama ini bernaung di bawah regulasi Dinas Pendidikan atau Kemendikbudristek yang menggunakan sistem pangkalan data Dapodik (Aulia & Anita, 2025). Namun, di sisi lain, urusan pembinaan profesi, penilaian kompetensi, tunjangan fungsional, hingga pencairan tunjangan profesi (sertifikasi) sepenuhnya menjadi domain kewenangan Seksi Pendidikan Agama Islam (PAIS) pada Kantor Kementerian Agama.

Kondisi dualisme administratif ini menuntut adanya sebuah jembatan interoperabilitas data yang sangat kokoh dan responsif. Kehadiran

EMIS 4.0 di bawah pengelolaan Kementerian Agama diharapkan mampu menjadi solusi mutakhir dalam menyelaraskan arus data lintas kementerian tersebut, sehingga hak-hak konstitusional serta kesejahteraan para pendidik agama dapat terpenuhi secara tepat waktu tanpa hambatan administratif yang merugikan (Mahendra, 2025).

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karawang, khususnya melalui Seksi PAIS, memegang peranan krusial sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam mengimplementasikan platform EMIS bagi ribuan Guru PAI di tingkat daerah, mulai dari jenjang TK, SD, SMP, SMA, hingga SMK. Untuk memastikan sistem ini berjalan sesuai dengan koridor yang diharapkan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karawang secara konsisten melakukan sosialisasi dan pengarahan berkala pada setiap awal tahun pelajaran (Nurazizah, 2026). Langkah taktis ini dilakukan secara terpusat dengan mengintegrasikan koordinasi antar-jenjang sekolah di bawah pengawasan satu titik guna menghemat ruang dan waktu.

Kesiapan di tingkat satuan pendidikan atau sekolah di wilayah Karawang pun secara umum menunjukkan tren yang positif, ditandai dengan penyediaan sarana penunjang seperti perangkat laptop mandiri, stabilitas jaringan internet Wi-Fi sekolah, serta penguatan kompetensi guru dalam mengoperasikan akun pangkalan data pribadi mereka guna melakukan pembaruan data secara mandiri.

Kendati infrastruktur lokal dan sosialisasi kebijakan telah diupayakan secara maksimal, kualitas layanan data berbasis EMIS di lapangan tidak pernah lepas dari berbagai dinamika teknis yang fluktuatif. Keberhasilan digitalisasi administrasi ini sangat bergantung pada sinergi tiga aktor utama, yakni Guru PAI sebagai *inputter* data awal, Operator EMIS Kabupaten sebagai garda depan penjamin mutu data (*data quality assurance*), dan Kepala Seksi PAIS sebagai pemegang kebijakan manajerial (Yeni, 2025).

Dalam praktiknya, proses penginputan komponen penting seperti profil kepegawaian, jadwal mengajar harian, serta beban mengajar minimal 24 jam tatap muka

sering kali terhambat ketika server pusat mengalami kelambatan (*down*) akibat kepadatan lalu lintas akses (*traffic congestion*) oleh pengguna se-Indonesia menjelang batas akhir penginputan (Ariatpi & Ismatullah, 2025). Ditambah lagi dengan durasi pemeliharaan sistem (*maintenance*) yang relatif lama dan problem sinkronisasi otomatis (*web service API*) yang kerap gagal menarik data dari Dapodik, menjadi tantangan nyata yang mendistorsi efisiensi waktu pelayanan data di daerah.

Fenomena fluktuasi kualitas pelayanan data di tengah antusiasme modernisasi ini menegaskan perlunya sebuah kajian ilmiah yang komprehensif, objektif, dan mendalam melalui pendekatan studi kasus di tingkat daerah. Penelitian ini hadir untuk mengeksplorasi secara empiris bagaimana realita implementasi EMIS di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karawang, alur verifikasi dan validasi (*verval*) berjenjang yang diterapkan oleh operator, serta bagaimana mekanisme evaluasi harian dilakukan untuk memitigasi kesalahan data (Afiyah, 2022).

Melalui analisis kualitatif deskriptif ini, diharapkan dapat terungkap secara jernih faktor-faktor determinan yang memengaruhi kualitas layanan data, efektivitas sistem terhadap kelancaran administrasi tunjangan guru, serta solusi taktis dalam mengatasi hambatan integrasi teknologi (Kusuma, 2022). Hasil akhir dari penelitian ini diproyeksikan mampu memberikan kontribusi pemikiran berupa rekomendasi konstruktif bagi pemangku kebijakan, baik di tingkat kabupaten maupun pusat, demi optimalisasi keberlanjutan modernisasi administrasi pendidikan di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus (*case study*) guna mengeksplorasi dan menguraikan secara mendalam fenomena kontemporer modernisasi administrasi serta kualitas layanan data berbasis Education Management Information System (EMIS) pada konteks kehidupan nyata (*real life context*) di Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Karawang (Pratiwi, et.al., 2025). Melalui pendekatan studi kasus ini, peneliti dapat menangkap keunikan dinamika operasional sistem, alur koordinasi berjenjang, hingga hambatan teknis secara komprehensif langsung dari sudut pandang para praktisi yang terlibat. Penentuan informan dilakukan secara sengaja menggunakan teknik purposive sampling untuk mendapatkan data yang kredibel dan trianggulasi dari tiga lapisan pemangku kepentingan (*stakeholders*) utama (Amaliya & Muhaimin, 2025). Lapisan tersebut meliputi pengguna utama (*endmuser*) yang diwakili oleh tiga Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) Sekolah Dasar, yaitu Pak Adang Saepudin, S.Pd.I., Ibu Ai Afif Sapotro Musadad, S.Pd.I., dan Ibu Marlina, S.Pd.I., verifikator teknis yaitu Operator EMIS PAI Kabupaten, Bapak Dudung Abdullah, S.Ag, serta pengambil kebijakan yaitu Kepala Seksi PAIS Kantor Kemenag Kabupaten Karawang, Bapak Edi Junaedi, S.Ag. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mengombinasikan dua instrumen

utama, yaitu wawancara mendalam (*in-depth interview*) secara terstruktur dan studi dokumentasi objek sistem. Wawancara mendalam dipandu oleh kisi-kisi pertanyaan yang mencakup aspek persiapan prasarana, pembagian tugas operator, alur validasi, efektivitas layanan, hingga kendala sistem di lapangan (Sinaga, et.al., 2025).

Sementara itu, studi dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder otentik berupa hasil cetak digital dan tangkapan layar (*screenshot*) antarmuka aplikasi EMIS 4.0 tingkat kabupaten yang memuat dasbor monitoring pangkalan data, daftar akun guru, formulir profil data diri, dan status keaktifan sistem serta dokumen bagan struktur tugas pokok fungsi Seksi PAIS tahun 2025 dan foto dokumentasi kegiatan bimbingan teknis persiapan pembaruan data bersama para guru. Seluruh data yang terkumpul kemudian diolah melalui model analisis interaktif yang meliputi reduksi data untuk membuang informasi tidak relevan, penyajian data secara naratif dan sistematis, hingga

penarikan kesimpulan akhir yang objektif (Erny, 2023).

Untuk menjamin keabsahan dan akurasi data (*trustworthiness*) dalam penelitian kualitatif ini, peneliti menerapkan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik secara ketat (Sepriano, et.al., 2023). Triangulasi sumber diwujudkan dengan mengonfrontasikan dan membandingkan secara silang narasi hasil wawancara dari sudut pandang objektif para Guru PAI selaku penginput data mandiri dengan data dari Operator EMIS selaku verifikator kabupaten serta Kepala Seksi PAI selaku penanggung jawab manajerial.

Di sisi lain, triangulasi teknik dilakukan dengan mencocokkan kebenaran informasi lisan yang dipaparkan oleh para informan dengan bukti-bukti fisik visual yang tertera pada dokumen tangkapan layar dasbor aplikasi EMIS berkas *standard operating procedure* (SOP) pembuatan akun, serta dokumen pembagian kerja organisasi yang berlaku di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karawang (Wahyuni, et.al., 2023). Melalui

kombinasi pengujian ini, bias penelitian dapat diminimalisir sehingga hasil analisis yang disajikan memiliki tingkat validitas ilmiah yang tinggi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis hasil penelitian mengenai kualitas pelayanan data dan modernisasi administrasi melalui platform *Education Management Information System* di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karawang diuraikan secara tematik berdasarkan data primer dan sekunder yang berhasil dihimpun di lapangan (Mahfuzi, 2025). Berdasarkan pendekatan studi kasus kualitatif, dinamika implementasi sistem ini tidak dipandang sebagai fenomena teknis semata, melainkan sebagai sebuah proses adaptasi sosio-teknis yang melibatkan interaksi antara regulasi, kesiapan aparatur daerah, kapabilitas infrastruktur lokal, serta respon riil dari para guru selaku ujung tombak penginput data.

Untuk memberikan gambaran yang utuh dan mendalam, pembahasan dalam bab ini dibagi ke dalam empat fokus kajian utama, yakni pengujian kesiapan sarana

prasarana satuan pendidikan, pemetaan kualitas alur verifikasi data berjenjang, evaluasi tingkat efektivitas sistem terhadap pelayanan publik, hingga pembedahan kendala sistemik beserta pola mitigasi yang diterapkan secara kolektif di lapangan. Seluruh temuan empiris tersebut ditelaah menggunakan pisau analisis teori administrasi publik dan dikonfrontasikan secara kritis dengan hasil-hasil penelitian dari para sarjana terdahulu guna membangun argumen ilmiah yang solid dan objektif (Elindah, 2024).

Kesiapan Sarana Prasarana dan Sosialisasi Kebijakan Modernisasi

Dalam diskursus ilmu administrasi publik dan manajemen perubahan, transformasi dari sistem tata kelola konvensional menuju basis digital mutlak memerlukan dua pilar utama, yakni kesiapan infrastruktur fisik (*tangibles*) yang andal serta efektivitas saluran diseminasi kebijakan kepada para pengguna di tingkat paling dasar (Sepriano, et.al., 2023). Tanpa adanya sosialisasi yang masif, terencana, dan berkesinambungan, implementasi teknologi baru pada sebuah instansi

birokrasi cenderung akan memicu resistensi, kebingungan teknis, hingga penurunan kualitas pelayanan publik akibat ketidaksiapan sumber daya manusia dalam mengadopsi pembaruan.

Dalam konteks pemanfaatan EMIS di tingkat daerah, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karawang melalui Seksi Pendidikan Agama Islam (PAIS) mengadopsi langkah taktis dengan menyelenggarakan pengarahannya secara berkala dan terpusat. Pendekatan ini dilakukan dengan menyatukan seluruh Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) lintas jenjang guna menyamakan persepsi operasional sistem pada setiap awal tahun pelajaran baru (Khotimah, et.al., 2025). Fenomena pengarahannya kebijakan secara terpadu ini digambarkan secara eksplisit oleh Pak Adang Saepudin, S.Pd.I. selaku Guru PAI Sekolah Dasar melalui penuturan berikut:

"Ya, tentu pihak sekolah mendapatkan arahan dan sosialisasi dari pihak EMIS. Biasanya setiap ada perubahan pada fitur EMIS, itu di awal tahun pelajaran

suka diadakan sosialisasi. Jadi dikumpulkan, misalnya perkecamatan seluruh sekolah dasar, baik negeri maupun swasta yang ada di Karawang Timur, dikumpulkan, terpusat di satu titik, diberikan sosialisasi oleh pihak Kemenag, dalam hal ini Seksi PAI. Sekarang digabung nih, dari TK sampai jenjang SMASMK, satu pengawas, jadi di sekolah-sekolah itu gabungan."

Melihat pada pemaparan data wawancara di atas, peneliti menganalisis bahwa model sosialisasi terpusat per kecamatan dengan menggabungkan seluruh jenjang pendidikan dari TK hingga SMA/SMK merupakan inovasi koordinasi yang sangat efisien untuk diterapkan di tingkat daerah. Langkah Seksi PAIS Kementerian Agama Kabupaten Karawang ini berhasil memotong sekat-sekat birokrasi sektoral yang selama ini memisahkan penanganan guru berdasarkan tingkat sekolah. Peneliti menilai bahwa pemusatan saluran informasi di satu titik koordinasi pengawas pembina mampu

menghemat waktu, anggaran negara, dan mengeliminasi potensi kesenjangan pemahaman regulasi antar-guru (Wahyuning, et.al., 2021).

Analisis terhadap data lapangan ini menunjukkan bahwa kesiapan di tingkat satuan pendidikan tidak hanya ditopang oleh kesadaran individu guru, tetapi juga didukung oleh ekosistem infrastruktur sekolah yang memadai (Kurniawan, 2022). Hal ini divalidasi oleh pernyataan Pak Adang Saepudin, S.Pd.I. mengenai parameter kesiapan fisik sekolah sebagai berikut:

"Ya tentunya kesiapan EMIS di sekolah untuk layanan administrasi, umumnya cukup baik ya. Meskipun masih ada beberapa kendala mungkin dalam ilmu ini, misalnya ada beberapa aspek yang kita persiapkan: adanya operator atau tenaga administrasi yang mengelola EMIS, terus ada juga perangkat pendukung seperti komputer atau laptop, jaringan internet berupa Wi-Fi di sekolah, serta kemampuan guru atau operator dalam meng-input dan memperbarui data, itu sudah dibekali oleh

Kemenag secara teknis bagaimana sudah diberitahu."

Pernyataan tersebut diperkuat oleh penjelasan Ibu Ai Afif Sapotro Musadad, S.Pd.I. yang memaparkan daya dukung internal sekolah secara lebih ringkas:

"Kalau kesiapan sekolah umumnya sudah cukup baik dan siap. Kami menyiapkan perangkat, Wi-Fi sekolah, sampai kemampuan gurunya sendiri buat input data."

Sebagai bentuk triangulasi sumber data, Ibu Marlina, S.Pd.I. turut memberikan kesaksian senada mengenai kondisi struktural sarana prasarana yang ada di sekolah:

"Kesiapan sekolah dalam menggunakan EMIS untuk layanan administrasi umumnya cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa kendala di lapangan. Kesiapan tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek, di antaranya tersedianya operator atau tenaga administrasi yang mengelola EMIS, yang kedua adanya perangkat pendukung

seperti komputer atau laptop dan jaringan internet, dan yang ketiga kemampuan guru atau operator dalam menginput dan memperbarui data."

Analisis peneliti terhadap rincian jawaban ketiga informan di atas memperlihatkan adanya konvergensi data yang kuat mengenai indeks kesiapan sekolah (Pratiwi, et.al., 2024). Fakta bahwa sekolah-sekolah di wilayah Karawang Timur umumnya telah siap menyediakan fasilitas laptop mandiri, tenaga operator, dan jaringan internet Wi-Fi membuktikan bahwa tantangan digitalisasi di daerah bukan lagi berada pada level ketiadaan infrastruktur dasar, melainkan pada optimalisasi penggunaannya. Peneliti melihat adanya sinkronisasi yang baik antara investasi teknologi sekolah dengan kebijakan makro kementerian.

Kondisi ini menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi guru untuk melakukan adaptasi teknologi tanpa harus terbebani oleh pengadaan fasilitas personal. Dari sisi penunjang instansi vertikal, sarana dan prasarana penunjang operasional

pun sudah disediakan secara memadai oleh kantor Kemenag Kabupaten Karawang. Temuan sosiologis di lapangan ini selaras dengan argumen teoretis yang menegaskan bahwa keberhasilan adopsi *e-government* di tingkat daerah sangat diakselerasi oleh frekuensi pendampingan kolektif secara tatap muka langsung pada fase-fase awal transisi sistem, di mana kesiapan perangkat fisik bertindak sebagai katalisator utama kelancaran program (Dewi, 2025).

Kualitas Layanan Data: Mekanisme Penginputan dan Alur Validasi Berjenjang

Kualitas pelayanan data di dalam ekosistem pemerintahan digital mutlak menuntut adanya pembagian kerja yang spesifik serta kejelasan mekanisme pengawasan berlapis demi menjamin validitas pangkalan data master nasional (Wahyudi, 2026). Jika sebuah sistem mengabaikan alur verifikasi yang ketat, pangkalan data yang dihasilkan akan rentan terhadap korupsi data, duplikasi, dan kekeliruan input yang pada akhirnya merugikan keuangan negara terkait penyaluran tunjangan profesi.

Kebijakan implementasi EMIS secara fundamental telah mengubah paradigma birokrasi yang semula bersifat sentralistik dan bergantung penuh pada operator sekolah, kini beralih menjadi sistem mandiri (*self-service*) di mana Guru PAI memegang kendali penuh atas akuntabilitas data pribadi serta jadwal mengajar mereka sendiri (Katharina, 2021). Kemandirian operasional dan tanggung jawab teknis dalam penginputan pangkalan data ini dipaparkan secara detail dan komprehensif oleh Pak Adang Saepudin, S.Pd.I. melalui penuturan berikut:

"Yang bertanggung jawab dalam pengelolaan EMIS, penginputan, pembaruan, dan sinkronisasi, yang pertama adalah guru PAI sendiri. Jadi kalau ada datadata yang kurang lengkap, mungkin kami berkoordinasi dengan operator untuk di-input ke Dapodik, sehingga data tersebut dapat ditarik untuk sinkronisasi dengan EMIS. Karena EMIS itu penggunaan guru PAI sendiri, jadi tidak menyerahkan komunikasi

penuh pada operator. Misalnya saya ke operator, input data ini terkait jadwal atau apa, nanti kan data yang dari Dapodik itu ditarik oleh EMIS. Kalau sudah semuanya diisi, kemudian kita ke operator, 'Operator tolong ituin, kesambungin', sinkron nanti ke EMIS secara otomatis."

Prinsip pertanggungjawaban mandiri guru atas data pribadi berbasis akun individu ini dipertegas kembali oleh Ibu Ai Afif Sapotro Musadad, S.Pd.I. melalui kutipan berikut:

"Yang tanggung jawab ya gurunya sendiri, karena kan ini akun kita masingmasing. Tapi kita tetap koordinasi dan dibantu sama operator sekolah untuk sinkronisasi data dari Dapodik."

Berdasarkan paparan data lisan tersebut, peneliti menganalisis bahwa kualitas layanan data EMIS dilindungi oleh pembagian tanggung jawab (*job description*) yang sangat berimbang di tingkat akar rumput (Furqon, 2024). Guru PAI diposisikan

sebagai pemilik data primer yang wajib menjamin kebenaran muatan pelajaran, jumlah siswa, dan jadwal mengajar mingguan, sedangkan operator sekolah bertindak sebagai fungsional penarik data induk lintas platform melalui Dapodik. Peneliti melihat alur ini berhasil memitigasi risiko kesalahan input massal yang kerap terjadi apabila beban pengerjaan data hanya ditumpukan pada satu operator sekolah. Pembagian peran ini menciptakan iklim akuntabilitas personal, di mana setiap guru merasa memiliki kewajiban moral untuk memastikan data mereka valid sebelum diintegrasikan ke tingkat kabupaten (Aidah, et.al., 2024).

Mengenai muatan materi data, Guru PAI wajib menyetorkan berbagai berkas penting ke dalam aplikasi. Terkait rincian kategori isian data yang diunggah secara rutin, Pak Adang Saepudin, S.Pd.I. memaparkannya secara rinci sebagai berikut:

"Datanya di sana ada data siswa, siswa per tingkat, ada jadwal setiap hari, misalnya kita hari Senin ngajar kelas berapa aja, jam berapa aja,

materinya apa, seperti itu. Ada juga data kepegawaian, data personal kita kalau kita PNS, data data pelatihan kita, data sertifikasi, dan data-data penting lainnya terkait dengan biodata kita, seperti itu."

Ibu Ai Afif Sapotro Musadad, S.Pd.I. turut melengkapi cakupan muatan data operasional pembelajaran yang wajib dimasukkan secara berkala ke dalam sistem:

"Data yang diisi itu data anak didik, jumlah siswa yang kita ampuh semester sekarang dalam satu semester itu berapa anak, terus muatan pelajarannya, minggu sekarang belajar apa, sama jadwal mengajar kita."

Sedangkan dari kacamata informan lain, yakni Ibu Marlina, S.Pd.I., ia merangkum seluruh rumpun isian tersebut ke dalam kesimpulan data administratif lembaga berikut:

"Data yang biasa diinput ke dalam EMIS biasanya meliputi berbagai data penting terkait lembaga, guru, dan peserta didik."

Standardisasi mutu penginputan dan pemeriksaan berkas ini tidak hanya berjalan secara situasional di sekolah, melainkan dikunci oleh regulasi operasional baku di tingkat instansi vertikal, yakni Kantor Kemenag Kabupaten Karawang. Pelaksanaan verifikasi ini didasarkan pada dokumen administratif *Standard*

Operating Procedure (SOP) Pelayanan Pembuatan Akun EMIS GPIS dan Pengawas

PAI yang merujuk pada regulasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, serta Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2019 (Zen, 2022).

Berdasarkan prosedur formal tersebut, persiapan teknis diawali oleh operator kabupaten dengan membuka dan menyalakan perangkat komputer, menyambungkan perangkat ke internet, lalu membuka tautan resmi pangkalan data EMIS pada *web browser*. Operator kabupaten menerima berkas permohonan akun dari para guru, meninjau ulang legalitasnya, lalu mencocokkan data

isian tersebut secara manual dengan dokumen fisik serta aplikasi penunjang ketiga seperti SIAGA Pendis guna menjamin validitas kepemilikan akun sebelum memberikan persetujuan akhir di dalam pangkalan data kementerian (Fitriah, 2024).

Prosedur validasi berjenjang yang ketat ini diakui secara langsung oleh Bapak Dudung Abdullah, S.Ag. selaku Operator EMIS Kemenag Kabupaten Karawang melalui penjelasan teknisnya:

"data dicek dan divalidasi langsung terhadap berkas dan informasi data pada berkas yang diberikan oleh GPAI serta dicek melalui aplikasi ketiga"

Pola verifikasi berlapis tersebut dikonfirmasi pula oleh Bapak Edi Junaedi, S.Ag. selaku Kepala Seksi PAIS Kantor Kemenag Kabupaten Karawang yang memaparkan pembagian porsi wewenang antara guru dengan pihak dinas:

"Input data emis bisa dilakukan langsung pada aplikasi emis dalam menu tertentu yang meminta input

data pada aplikasi emis Guru dan Pengawas PAI, untuk operator kabupaten melaksanakan verifikasi data yang diajukan oleh GPAI melalui emis GPAI"

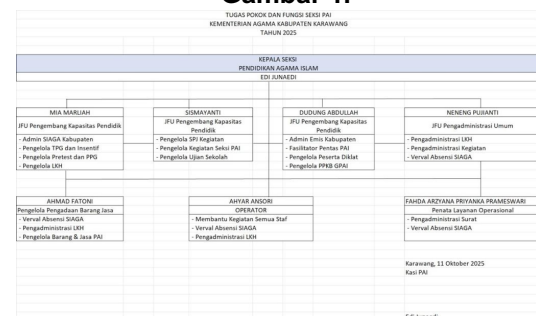
Melalui analisis mendalam terhadap narasi alur kerja dan struktur fungsional di atas, peneliti menyimpulkan bahwa jaminan kualitas layanan data berbasis EMIS di Kabupaten Karawang ditopang oleh sistem hukum yang legal serta pengawasan berjenjang yang tertata rapi (Mukhlis, 2024). Tugas Operator EMIS Kabupaten tidak sekadar menerima kiriman data digital, melainkan melakukan proses verifikasi dan validasi (*verval*) manual dengan mengonfrontasikan data di layar komputer terhadap berkas fisik asli (seperti SK Pembagian Tugas Mengajar) yang diajukan oleh guru. Peneliti menilai model diferensiasi fungsi dan pendelegasian wewenang spesifik ini sangat efektif dalam menutup celah terjadinya maladministrasi data guru penerima tunjangan profesi. Kejelasan alur dalam operasional ini memberikan kepastian hukum bagi pengguna layanan, sehingga

transparansi birokrasi dapat terwujud secara objektif di tingkat daerah. Kejelasan alur dalam operasional ini memberikan kepastian hukum bagi pengguna layanan, sehingga transparansi birokrasi dapat terwujud secara objektif di tingkat daerah (Malang, 2021).

Untuk mempermudah pemahaman mengenai pembagian wewenang dan struktur fungsional pelayanan ini, berikut disajikan bagan tugas pokok dan fungsi yang berlaku pada instansi:

**Struktur Organisasi dan Tugas Pokok Fungsi
Seksi PAIS Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karawang**

Gambar 1.



Temuan penelitian ini memperkuat teori organisasi yang menyatakan bahwa kejelasan rincian tugas (*job description*) dan penunjukan personal pelaksana yang kompeten pada unit teknis lembaga pendidikan berkorelasi positif terhadap minimnya angka kekeliruan data publik.

Analisis Efektivitas Sistem terhadap Kualitas Pelayanan Publik

Berdasarkan pendekatan teoretis *Technology Acceptance Model* (TAM), efektivitas sebuah inovasi sistem informasi dinilai dari dua variabel determinan utama, yaitu persepsi terhadap kemudahan penggunaan dan persepsi terhadap asas kemanfaatan nyata dalam memotong rantai birokrasi yang gemuk demi mempercepat pelayanan publik (Sugiarti, 2020).

Di lingkungan Kementerian Agama, keberhasilan modernisasi administrasi melalui platform EMIS diukur dari kemampuannya mengintegrasikan seluruh komponen pangkalan data guru demi kelancaran hak-hak normatif kepegawaian dan pencairan tunjangan profesi secara tepat sasaran (Hardianto, et.al., 2025). Mengenai parameter efektivitas capaian kinerja instansi daerah tersebut, Kepala Seksi PAIS Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karawang, Bapak Edi Junaedi, S.Ag., memberikan penjelasannya secara rinci sebagai berikut:

"Tujuan utama penggunaan EMIS dalam layanan

administrasi PAIS yaitu menertibkan Data GPAl, sebagai wadah atau Pengelola data GPAl yang resmi, mempercepat pelayanan Data GPAl."

Pernyataan resmi dari Kepala Seksi PAIS di atas dianalisis oleh peneliti sebagai sebuah pengakuan empiris bahwa EMIS telah sukses memposisikan diri sebagai pangkalan data tunggal yang sah (*single source of truth*) di tingkat kabupaten (Nissa, et.al., 2025). Pernyataan ini disoroti secara positif oleh para guru di lapangan yang merasakan manfaat efisiensi pelayanan secara langsung. Keberhasilan sistem ini diakui secara antusias oleh Pak Adang Saepudin, S.Pd.I. melalui kalimat berikut:

"Sudah sangat efektif karena sifatnya yang digital dan terpusat, manajemen data PAI jadi lebih rapi."

Ibu Ai Afif Sapotro Musadad, S.Pd.I. turut menguraikan efektivitas integrasi sistem ini yang berdampak pada keterkaitan antarsistem aplikasi kementerian:

"Iya sepanjang ini kita rasa efektif karena kita itu dua-duanya harus sinkron, seperti itu. Jadi data dari EMIS itu ditarik kepada Siaga Pendis, kayak kalau di dinas mah Dapodik seperti itu. Apa yang kita inputkan di EMIS, kemudian ada di Siaga. Siaga juga seperti itu. Efektif Neng selama ini, gitu. Cuman tadi doang kendalanya suka lemot aja."

Ibu Marlina, S.Pd.I. pun menyepakati indikator keberhasilan tersebut dengan membandingkan performa sistem digital terhadap pola tata kelola manual konvensional:

"Ya, pada umumnya penggunaan EMIS ini membantu layanan administrasi menjadi lebih cepat dan lebih efisien."

Proses modernisasi administrasi ini terbukti berhasil mereduksi waktu tunggu pelayanan data guru yang semula memakan waktu sehari-hari akibat pemeriksaan berkas fisik manual, menjadi jauh lebih instan berkat sistem digitalisasi terpadu. Kecepatan pelayanan ini secara

langsung meningkatkan performa birokrasi

Kantor Kemenag Karawang dalam melayani kebutuhan para guru agama

(Ratnaningsih, et.al., 2025).

Peneliti menemukan bahwa interkoneksi data secara otomatis antara EMIS dengan aplikasi Siaga Pendis memberikan dampak luar biasa bagi akurasi pemberian Tunjangan Profesi Guru (TPG). Melalui sinkronisasi ini, guru yang terbukti aktif mengajar minimal 24 jam tatap muka di EMIS akan langsung terverifikasi secara linier di aplikasi Siaga (Anastasia, et.al., 2023).

Keuntungan tambahan dari sistem digital ini adalah tingkat keamanan dokumen yang sangat tinggi. Manfaat proteksi berkas digital ini dirasakan langsung oleh Pak Adang Saepudin, S.Pd.I. sebagaimana ia paparkan dalam wawancara:

"Sangat membantu. Jadi setelah kita upload ke EMIS, secara otomatis data itu kan tersimpan dengan aman."

Sehingga ketika kita lupa, file-file itu tetap ada di sana."

Pernyataan di atas dianalisis oleh peneliti sebagai bukti nyata keunggulan komparatif EMIS dalam menjamin keamanan arsip negara. Berkas yang diunggah tersimpan aman di server awan (*cloud server*) pusat, menghilangkan kecemasan guru akan risiko dokumen hilang, robek, atau rusak akibat kelalaian fisik atau bencana di sekolah (Sopiana, 2024). Bapak Dudung Abdullah, S.Ag. pun menegaskan bahwa dari segi proteksi, platform ini dilindungi oleh proteksi tingkat tinggi:

"kemanan dalam system emis sudah terintegrasi dari Kemenag Pusat".

Peneliti menyimpulkan bahwa sistem ini berhasil menekan angka penyimpangan anggaran serta meningkatkan indeks kepuasan para guru agama terhadap kinerja birokrasi Kemenag Karawang. Hasil analisis lapangan ini memperkuat riset mutakhir yang menegaskan bahwa digitalisasi administrasi keagamaan berbasis pangkalan data terpusat terbukti secara signifikan mampu meningkatkan transparansi,

akuntabilitas, dan objektivitas tata kelola pemenuhan hak finansial pendidik (Rachman, 2021).

Kendala Teknis Lapangan dan Pola Evaluasi Mitigasi

Teori ketergantungan teknologi memberikan kerangka analisis kritis bahwa digitalisasi layanan publik yang menerapkan arsitektur sistem terpusat (*sentralistik*) pada negara-negara berkembang sering kali memicu fenomena penurunan kualitas layanan di tingkat daerah akibat ketidaksiapan infrastruktur server induk dalam menampung lonjakan beban akses pada masa beban puncak (*peak load*). Masalah keterbatasan kapasitas tampung ini memicu terjadinya fluktuasi pelayanan data, di mana kemacetan digital kerap melanda para pengguna di daerah ketika batas akhir penginputan (*deadline*) laporan semakin dekat (Talaohu, et.al., 2026). Hambatan teknis yang bersifat sistemik dan berulang di lapangan ini dirasakan secara langsung oleh Ibu Ai Afif Sapotro Musadad, S.Pd.I. sebagaimana diungkapkan dalam keluhan berikut:

"EMIS ini merupakan yang kedua daripada Siaga. Di

Kemenag itu ada dua, yaitu Siaga Pendis sama EMIS Pais ya. Kendalanya biasanya kita itu karena server banyak yang memakai, jadi suka terkendala di servernya agak lemot. Selain jaringan internet kita juga ya, kadang Wi-Fi, kadang memakai data seluler, seperti itu. Sistemnya kadang-kadang ya error ya Pak Adang, harus diclose dulu, diminta maintenance sih. Jadi kita guru PAI itu nunggu dulu sampai benar-benar terbuka, baru kita dapat input, seperti itu Neng."

Faktor kepadatan traffic server nasional ini dikonfirmasi pula oleh Pak Adang Saepudin, S.Pd.I. yang menyoroiti kendala eksternal di luar kendali pihak sekolah: "Kendalanya kadang di sistem internet atau pemahaman guru yang harus terus diperbarui, tapi yang paling sering ya kalau server dari pusatnya sedang padat atau error".

Pak Adang juga menambahkan situasi spesifik di mana sistem mengalami kelompokan interaksi antardata:

"Pernah, kalau pas server pusat lagi down atau sinkronisasi massal, itu pasti menghambat waktu penginputan kita."

Sebagai bentuk penajaman dampak, Ibu Ai Afif Sapotro Musadad, S.Pd.I.

memaparkan konsekuensi psikologis dari adanya masa pemeliharaan (*maintenance*) sistem yang memicu keterbatasan waktu pengerjaan guru di daerah:

"Iya tentu saja. Karena *maintenance* di sananya tertutup, otomatis kita juga lambat untuk akses ke situ, gitu. Soalnya kami teh mengejar-ngejar waktu supaya beres Juni ya."

Keluhan kolektif para pendidik tersebut disepakati oleh Ibu Marlina, S.Pd.I.

yang menyatakan:

"Kendalanya masih terdapat di lapangan, terutama kendala teknis pada sistem EMIS nya itu sendiri saat diakses secara bersamaan."

Serta dikonfirmasi oleh Operator Kemenag, Bapak Dudung Abdullah, S.Ag. yang mengidentifikasi letak hambatan utama:

“kendala yaitu sinkronisasi dari dapodik dan kadang kendala jaringan”.

Melalui analisis kritis terhadap keluhan teknis di atas, peneliti melihat adanya kesenjangan (*gap*) infrastruktur digital yang nyata antara ekspektasi modernisasi pusat dengan realita daya dukung server nasional. Hambatan berupa kelambatan sistem, eror aplikasi yang memaksa guru menutup paksa peramban (*web browser*), hingga durasi pemeliharaan (*maintenance*) server pusat yang memakan waktu hingga satu minggu bertindak sebagai faktor penghambat utama yang mendistorsi efisiensi waktu kerja para guru di Kabupaten Karawang (Prasasti, 2025). Hambatan penarikan data otomatis lintas kementerian (Dapodik Kemendikbudristek menuju EMIS Kemenag) juga menambah beban psikologis guru karena adanya kekhawatiran hak sertifikasi mereka tidak cair akibat kegagalan sinkronisasi sistem jembatan (API).

Melalui analisis kritis terhadap keluhan teknis di atas, peneliti melihat adanya kesenjangan (*gap*) infrastruktur digital yang nyata antara ekspektasi modernisasi pusat dengan realita daya dukung server nasional (Carolina, et.al., 2025). Hambatan berupa kelambatan sistem, eror aplikasi yang memaksa guru menutup paksa peramban (*web browser*), hingga durasi pemeliharaan (*maintenance*) server pusat yang memakan waktu hingga satu minggu bertindak sebagai faktor penghambat utama yang mendistorsi efisiensi waktu kerja para guru di Kabupaten Karawang. Hambatan penarikan data otomatis lintas kementerian (Dapodik Kemendikbudristek menuju EMIS Kemenag) juga menambah beban psikologis guru karena adanya kekhawatiran hak sertifikasi mereka tidak cair akibat kegagalan sinkronisasi sistem jembatan (API) (Muttaqin, 2025).

Untuk memberikan ilustrasi empiris mengenai kompleksitas pengelolaan basis data guru serta proses verifikasi data di lapangan, berikut dicantumkan bukti visual dari

Ai Afif Sapotro Musadad, S.Pd.I. melalui paparan berikut:

"Nah, evaluasinya itu kita kalau upload EMIS suka bareng-bareng ya Pak.

Seperti itu. Karena kita kan pembagian kelasnya itu kan saya kelas 1 and kelas 2, Pak Adang kelas 3 dan kelas 4, Bu Marlina kelas 5 dan kelas 6. Nah, itu kita ada rotasi setiap tahunnya itu. Nanti bergantian, Pak Adang kelas rendah, Bu Marlina kelas tinggi, kita kelas tengah, seperti itu. Nah, otomatis kita itu harus sinkron, jadi kita itu bareng di dalam pengerjaannya, gitu."

Langkah penyelesaian masalah di tingkat internal sekolah ini diperkuat oleh pernyataan ringkas dari Ibu Marlina, S.Pd.I.:

"Evaluasi dilakukan melalui koordinasi internal antara Kepala Sekolah, operator EMIS, dan guru PAI yang bersangkutan jika ada kendala sistem."

Apabila ditemukan anomali atau kerusakan data yang tidak dapat diselesaikan di tingkat satuan pendidikan, pihak operator

kabupaten segera membangun jaringan komunikasi tripartit demi penyelamatan data guru (Neng, 2022). Langkah taktis penyelesaian ini dipaparkan secara gamblang oleh Bapak Dudung Abdullah, S.Ag. selaku pelaksana teknis kabupaten:

"berkoordinasi dengan GPAI, berkoordinasi dengan Operator emis Kanwil, dan perbaikan langsung pada aplikasi emis."

Analisis peneliti terhadap pola mitigasi ini menunjukkan bahwa pihak Kemenag Karawang dan para guru agama di sekolah tidak bersikap pasif atau menyerah pada keterbatasan sistem digital (Susanto, 2022). Ketika server pusat mengalami gangguan di siang hari, para guru secara adaptif mengubah pola kerja dengan melakukan penginputan data secara kolektif bersama-sama pada waktu malam hari saat lalu lintas server mulai longgar. Mereka saling mengkoscek potensi jadwal mengajar yang bentrok lintas kelas agar valid saat ditarik oleh sistem.

Di sisi lain, pemanfaatan grup koordinasi WhatsApp dan Telegram sebagai saluran komunikasi harian terbukti menjadi solusi instan bagi

operator kabupaten untuk memberikan bantuan teknis dan pendampingan langsung secara *real time* tanpa harus menunggu birokrasi surat-menyurat resmi yang kaku (Dewi, 2025).

Peneliti menyimpulkan bahwa pola mitigasi berbasis komunitas ini sejalan dengan teori administrasi modern yang menyatakan bahwa pemanfaatan jaringan komunikasi informal (media sosial) bertindak sebagai instrumen katup penyelamat (*safety valve*) birokrasi digital di saat kanal digital formal mengalami kelumpuhan teknis struktural (Fadhl, 2024).

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya mengenai Analisis kualitas layanan sistem EMIS di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karawang, maka peneliti menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tatanan operasional ditemukan kesenjangan (*gap*) infrastruktur digital yang nyata antara kebijakan modernisasi pusat dengan realita daya dukung

server nasional. Hambatan utama yang terjadi di lapangan meliputi kelambatan sistem, tingginya frekuensi eror aplikasi, durasi pemeliharaan (*maintenance*) server pusat yang lama, hingga kegagalan sinkronisasi otomatis jembatan sistem (API) lintas kementerian antara Dapodik Kemendikbudristek dan EMIS Kemenag.

Kompleksitas hambatan teknis ini tidak hanya mendistorsi efisiensi waktu kerja operasional, melainkan juga memicu beban psikologis bagi Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) akibat kekhawatiran atas terhambatnya validasi data master yang menjadi syarat mutlak pencairan hak sertifikasi mereka

2. Kendala sistemik yang masif, proses pengelolaan dan verifikasi data master guru di Kabupaten Karawang tetap dapat berjalan dengan optimal melalui mekanisme mitigasi berbasis daerah. Hambatan teknis tersebut berhasil diredam secara efektif melalui penguatan modal sosial yang diwujudkan dalam

bentuk kelompok kerja guru (*peer-group*), pengetahuan pengawasan internal secara berkala, serta pemanfaatan saluran komunikasi informal secara intensif. Koordinasi harian yang konsisten antara jajaran pengurus Kemenag Karawang dan para guru terbukti mampu menyelesaikan kendala aksesibilitas secara kolektif, sehingga validitas data pada antarmuka EMIS tetap terjaga demi menjamin kelancaran administrasi kedinasan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Alamsyah, H. K., Ariesmansyah, A., Arifin, R. K., et al. (2025). *Administrasi publik era digitalisasi*. Mega Press Nusantara.
- Aulia, R. N., & Marini, A. (2025). *Manajemen sistem informasi pendidikan tinggi: Teori, strategi dan implementasi*. Publica Indonesia Utama.
- Katharina, R. (2021). *Pelayanan publik & pemerintahan digital Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Khotimah, K., Dayar, M. B., Ilyasi, A., Chilmy, N. W., Hikmah, F. N., Sunarto, I., & Mayasari, N. (2025). *Administrasi publik: Birokrasi menuju transformasi digital*. Penerbit Widina.

Pratiwi, D., Putra, S., Darwiyanti, A., et al. (2024). *Kebijakan pendidikan*. Sada Kurnia Pustaka.

Sepriano, S., Hikmat, A., Munizu, M., Nooraini, A., Sundari, S., Afyah, S., et al. (2023). *Transformasi administrasi publik menghadapi era digital*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.

Sugiarti, T., & Ak, S. E. M. (2020). *Sistem informasi keuangan sekolah melalui pendekatan technology acceptance model (TAM)*. Penerbit Adab.

Susanto, M. A. (2022). *Radikalisme dan strategi resiliensi pelajar di sekolah dan madrasah*. Publica Indonesia Utama.

Talaohu, A. R., Wasahua, S., Rumakat, E., et al. (2026). *Strategi penguatan tata kelola pemerintahan di era digital*. CV Edu Akademi.

Wahyudi, H. (2026). *Mengawal layanan publik digital: Pelajaran pengawasan Ombudsman dan APIP di daerah*. Detak Pustaka.

Artikel in Press :

- Afiah, S. (2022). Transformasi birokrasi pemerintah dalam penerapan e-government pada new normal. *HUMANIS: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, 14(1), 55–61.
- Aidah, A., Arifudin, O., Kartika, I., & Ibrahim, T. (2024). Pengembangan sistem informasi manajemen dalam dunia pendidikan. *Jurnal Tahsinia*, 5(6), 966–977.
- Amaliya, N., & Muhaimin, H. (2025). Pengembangan SDM Pemerintahan Desa Pegayaman dalam e-government di era Society

- 5.0. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(4), 4488–4497.
- Ariatpi, F., & Ismatullah, A. (2025). Dampak implementasi sistem informasi manajemen terhadap kualitas layanan administrasi pendidikan. *Epistemic: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 4(2), 253–272.
- Hardianto, D., Abduloh, A., Ismaya, B., & Rochaendi, E. (2025). Efektivitas penerapan e-RKAM sebagai aplikasi keuangan madrasah berdasarkan pendekatan Technology Acceptance Model. *Ideguru: Jurnal Karya Ilmiah Guru*, 10(3), 2162–2170.
- Huda, N. J., & Hidayat, H. H. (2026). Sistem informasi manajemen berbasis Edutren (studi kasus administrasi kesarifan di Pesantren Idrisiyyah Putri Tasikmalaya). *Mudir: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 8(1), 349–357.
- Kusuma, F. K. (2022). Kesiapan dan tantangan aparatur sipil negara dalam menghadapi perkembangan teknologi guna mempercepat pembangunan berkelanjutan di era Revolusi Digital Society 5.0. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(1), 732–739.
- Maulana, A. (2021). Implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagai upaya meminimalisir terjadinya praktik maladministrasi di ATR/BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(4), 1099–1102.
- Musoffa, S. (2021). Pembelajaran daring masa pandemi Covid-19 di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur. *Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam*, 18(1).
- Nissa, Z., Nurdin, N., & Nur, M. D. M. (2025). Analisis pengelolaan data EMIS 4.0 di tingkat Madrasah Ibtidaiyah pada Kantor Kementerian Agama Kota Palu. *Jurnal Integrasi Manajemen Pendidikan*, 4(2), 46–55.
- Pratiwi, S. F., Zalukhu, L. A., Tesa, A. R., & Saputra, B. (2025). Implementasi digital pada tata kelola administrasi: Upaya meningkatkan mutu pelayanan di era birokrasi modern. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(11).
- Ratnaningsih, R., Yunani, J., Hendriana, T. I., Faryd, F., & Dewi, I. I. (2025). Inovasi penerapan teknologi digital dalam pengelolaan arsip elektronik. *Jurnal Digitalisasi Administrasi Bisnis*, 3(1), 38–42.
- Sinaga, R. C., Sunarto, E. P., Hafiz, Z., & Aji, P. (2025). Reformasi birokrasi melalui regenerasi aparatur sipil negara dalam mewujudkan birokrasi yang transformatif di era digital. *Journal of Social Contemplativa*, 3(2), 114–125.